

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

Optimalisasi Pelayanan melalui penggunaan
Aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA)
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN I



Dibuat oleh:
Andi Wirya Purwasena, S.ST, M.M
NIP. 198006171999031001

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Aksi Perubahan Pelayanan Publik dengan judul :
“Optimalisasi Pelayanan melalui penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya”

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2024:

Nama : Andi Wirya Purwasena, S.ST M.M

NIP : 198006171999031001

Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa, 28 Mei 2024.

Menyetujui :

Cikeas, 27 Mei 2024.

COACH



Ir. Achmad Taufiq Hidayat M.Si QRMO
NIP. 197002141995031002

MENTOR



Yuhendri S.SiT M.M
NIP. 197808311998031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga Laporan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam penilaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2024. Perancangan aksi perubahan merupakan proses menemukan masalah, menganalisis masalah, mencari inovasi untuk menyelesaikan dan strategi implementasinya. Penulis mengangkat topik mengenai “*Optimalisasi Pelayanan melalui penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya*” yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan di unit kerja penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.

Dalam melakukan penyusunan aksi perubahan ini, penulis didukung dan dibantu oleh beberapa pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rancangan aksi perubahan ini baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar :

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber daya Manusia, Kementerian ATR /BPN, yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas dalam pelaksanaan diklat.
2. Bapak Ir. Achmad Taufiq Hidayat M.Si QRMO yang merupakan *coach* penulis dalam menyusun aksi perubahan, yang selalu memberikan bimbingan dengan jelas dan memotivasi.
3. Semua widyaiswara PPSDM pengajar PKP Angkatan I/ 2024 yang telah memberikan materi pelatihan dengan jelas dan komprehensif.
4. Bapak Yuhendri S.SiT M H.yang menjadi mentor dalam aksi perubahan yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk berbuat yang terbaik.
5. Rekan – rekan Tim Efektif Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.
6. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2024 yang selalu bersedia berbagi data dan ilmu.

Akhirnya penulis sebagai manusia terbatas menyadari bahwa penyusunan aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna, karena itu Penyusun pun terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Meskipun demikian penulis berharap bahwa Aksi Perubahan ini dapat pula berguna untuk pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Bogor, Mei 2024
Penyusun

Andi Wirya Purwasena, S.ST M.M
NIP.198006171999031001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan Aksi Perubahan	8
C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	8
D. Analisis Masalah	11
E. Strategi Penyelesaian Masalah	11
F. Pemetaan Sikap Perilaku	11
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	12
A. Membangun Integritas	12
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)	14
C. Pengelolaan Tim	16
D. Strategi Pengembangan Kompetensi <i>Stakeholders</i>	18
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	20
A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi	20
B. Manfaat Aksi Perubahan	31
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	35
D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan	35
E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	38
BAB IV DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN	39
A. Penerapan Strategi Komunikasi	39
B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi	40
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tim efektif.....	9
Tabel 2. Kompetensi Stakeholder.....	12
Tabel 3 Mata pelatihan pilhan.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Koordinasi dan Konsultasi dengan mentor.....	21
Gambar 2. Rapat Koordinasi dan pembentukan tim.....	22
Gambar 3. Undangan Pembentukan Tim Aksi Perubahan.....	23
Gambar 4. Surat Keputusan Tim Aksi Perubahan.....	24
Gambar 5. Rapat Koordinasi Internal	24
Gambar 6. Halaman SINTA	25
Gambar 7. Sosialisasi di Nagari Sungai Rumbai.....	27
Gambar 8. Hasil Aplikasi SINTA.....	29
Gambar 9. Penggunaan aplikasi	30

BAB I

RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dibidang pertanahan jadi sorotan saat ini, Kementerian ATR/BPN dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, apalagi sudah menjadi komoditi politik dengan adanya percepatan sertifikasi diseluruh wilayah Indonesia. Di era Digital ini semua kegiatan dapat langsung dipantau dari media elektronik sehingga Kementerian ATR/BPN harus cepat menyikapinya. Kementerian ATR/BPN sudah memulai transformasi digital didalam pengelolaan administrasi pertanahan. Iklim investasi setelah diundangkannya cipta kerja menuntut kesiapan kementerian dalam mempermudah pelayanan. Pelayanan elektronik menjadikan pelayanan bisa dilakukan dimana saja kapan saja. Kemudahan akses melalui perangkat digital dapat mempermudah dalam percepatan dunia investasi dan ekonomi global. Disisi Ekonomi Saat ini kebutuhan akan kredit perbankan cukup tinggi ini pun disikapi oleh adanya Hak Tanggungan Elektronik (HT el) yang sangat memudahkan dibuktikan dengan tingginya jumlah HT yang masuk dibandingkan dengan sebelum adanya HT el.

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 31 mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Fasilitasi layanan informasi nilai tanah, asset dan property merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan nilai tanah. Pemanfaatan nilai tanah nantinya dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dan pendayagunaan ekonomi pertanahan.

Layanan informasi nilai tanah, asset dan property saat ini belum semua dapat diakses secara langsung oleh Masyarakat. Layanan diperoleh dengan mendatangi kantor pertanahan setempat. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, layanan ini dapat diakses secara elektronik dengan menggunakan akun mitra BPN. Sementara itu bagi Masyarakat umum, instansi terkait maupun badan hukum dapat melakukan permohonan layanan informasi nilai tanah, asset dan property dengan mendatangi langsung Kantor Pertanahan.

Kabupaten Dharmasraya dengan luas daerah sekitar 2.961,13 Km² dan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pulau Punjung menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi nilai tanah, asset dan property namun memiliki jarak rumah cukup jauh dari ibukota kabupaten. Beberapa kecamatan memiliki durasi tempuh 1 jam hingga 2 jam menuju pusat pemerintahan diibukota kabupaten. Berdasarkan permasalahan ini perlu aksi perubahan diberikan solusi agar masyarakat lebih mudah dalam mengajukan permohonan layanan informasi nilai tanah, asset dan property.

1. Kondisi saat ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yaitu
 - a. Lambatnya pelayanan pemeliharaan data (jual beli, hibah, waris dll) dan pendaftaran hak asal SK pemberian hak, karena terhambatnya persyaratan validasi BPHTB oleh Pemda.
 - b. Lambatnya Pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian di kegiatan Pengadaan Tanah karena alasan kekurangan anggaran oleh instansi yang memerlukan tanah.
 - c. Masih rendahnya pelayanan informasi nilai tanah/ZNT.

2. Kondisi Yang diinginkan
 - a. Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah secara maksimal oleh eksternal/masyarakat untuk dijadikan informasi atau acuan dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli Daerah melalui BPHTB dan meningkatkan pajak penghasilan dalam transaksi jual beli tanah.
 - b. Peta Zona Nilai Tanah menjadi referensi penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah oleh instansi yang memerlukan tanah.
 - c. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) yang dapat meningkatkan pelayanan informasi tanah/ZNT dengan mudah, sederhana dan cepat.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Maksud dan Tujuan dari aksi perubahan yang dilakukan terhadap layanan informasi nilai tanah, asset dan property adalah

- a. Tujuan Jangka Pendek yang akan dicapai dalam 2 bulan (output)

Terbentuk sistem layanan digital berbasis internet memanfaatkan platform google form serta meningkatnya jumlah pelayanan Informasi nilai tanah online pada satu kecamatan yaitu kecamatan Sungai Rumbai



- b. Tujuan Jangka Menengah akan dicapai dalam 6 bulan kedepan
Terwujudnya pelayanan Informasi nilai tanah di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
- c. Tujuan Jangka Panjang yang akan dicapai dalam 1 tahun kedepan
Terwujudnya pelayanan Informasi nilai tanah di seluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut diharapkan aksi perubahan ini akan memberikan manfaat yang maksimal dan signifikan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Daerah, masyarakat umum dapat lebih efisien dalam mengakses dan menerima hasil informasi nilai tanah, asset dan property

C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup aksi perubahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang peserta pimpin yaitu melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Dilihat dari sisi kewenangan jabatan, maka ruang lingkup aksi perubahan ini berkaitan dengan wewenang peserta selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, yakni:

1. Memantau dan mengelola data terkait zona nilai tanah
2. Melakukan pemetaan zona nilai tanah memperbaharui informasi secara berkala
3. Memberikan rekomendasi terkait penyesuaian nilai tanah berdasarkan perubahan kondisi pasar

Ruang Lingkup aksi perubahan yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya yang berkonsentrasi meningkatkan kualitas pelayanan elektronik.

a. Membangun tim efektif :

- 1) Koordinasi dengan stakeholder
- 2) Penerbitan SK Tim
- 3) Rapat-rapat

b. Merancang sistem :

- 1) Simpul koordinasi dari loket untuk mengarahkan penggunaan aplikasi
- 2) Edukasi pelayanan publik mengenai Informasi Nilai Tanah



c. Implementasi :

- 1) Sosialisasi penggunaan aplikasi
- 2) Uji coba pelaksanaan kegiatan

d. Monitoring dan evaluasi :

- 1) Evaluasi pelaksanaan
- 2) Penyusunan laporan rencana tindak lanjut
- 3) Seminar hasil aksi perubahan

D. ANALISA MASALAH

Dari analisis masalah yang telah diuraikan dalam rancangan aksi perubahan, dapat teridentifikasi masalah utama yaitu kurang optimalnya pelayanan informasi nilai tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Dharmasraya, dengan faktor penyebab utama yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi terkait nilai tanah.
2. Belum didigitisasinya dokumen hasil kegiatan layanan nilai tanah.
3. Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Nilai Tanah.

Berangkat dari faktor penyebab utama yang perlu diperhatikan sebagaimana uraian diatas, kurang optimalnya pelayanan informasi nilai tanah diakibatkan oleh kurangnya dari tata kelola data yang belum baik dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimum sebagai instrumen pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Data yang belum tertata dengan baik akan berimplikasi pada lamanya pengambilan keputusan karena dilakukan secara manual sehingga menimbulkan kekhawatiran, keragu-raguan dan bahkan memungkinkan pelaksana menunda kegiatan. Selain itu, data yang belum tertata dengan baik tidak akan bisa memunculkan tipologi permasalahan yang spesifik, tidak dapat mengendalikan kegiatan secara baik, tidak dapat mengawasi hasil pekerjaan pelaksana secara baik, menyulitkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

E. Strategi penyelesaian masalah

Untuk penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi dalam rancangan aksi perubahan maka perlu adanya strategi penyelesaian masalah, yang mana dalam aksi perubahan ini



peserta memilih jenis inovasi teknologi, dengan harapan bahwa inovasi teknologi dapat mempercepat realisasi pelaksanaan pelayanan informasi nilai tanah yang dapat diakses dimana pengguna berada.

Gagasan terobosan inovasi yaitu berupa Portal Data dan Informasi Layanan Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Adapun ruang lingkup terobosan inovasi Portal Data dan Informasi ini mencakup data tekstual dan data spasial hasil pemetaan Zona Nilai Tanah.

F. Pemetaan Sikap Perilaku

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Peserta dan Mentor, diperoleh nilai akhir sikap perilaku 8,22 dengan kualifikasi Baik, yang berarti tidak terjadi gap, hal ini menunjukkan bahwa peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat pelaksanaan aksi perubahan dengan bimbingan dan pendampingan dari Mentor. Sebagai evaluasi dari mentor, maka peserta harus menyampaikan evidence dan melaporkan progres setiap aksi perubahan secara berkala.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas juga diartikan sebagai sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Dalam konteks pekerjaan maka integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi. Integritas tidak dapat terlepas dari apa yang dimaksud dengan komitmen. Komitmen PNS/ASN adalah sumpah/ janji demi Allah yang diperuntukkan bagi setiap calon PNS/ASN pada saat pengangkatannya menjadi PNS/ASN untuk selalu komit (bersumpah dan janji), sebagai berikut:

1. Akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
3. Akan menjaga kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS dan akan mengutamakan kepentingan negara;
4. Akan memegang rahasia negara; dan
5. Akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat demi negara. (Pasal 26 UU tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai wujud integritas masa kini banyak ditemui tantangan. Tantangan yang berpotensi mengganggu integritas ASN dapat berupa penyalahgunaan jabatan. Memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dapat menodai etika dan integritas ASN. Oleh sebab itu, dalam rangka memperkuat Pasal 4 tentang Nilai Dasar dan Pasal 5 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *branding* “Bangga Melayani Bangsa” melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021.

Core values ASN BerAKHLAK adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi
2. kepuasan masyarakat;
3. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
4. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
5. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
6. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
7. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta
8. menghadapi perubahan;
9. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis;

Mengenai membangun integritas dapat ditunjukkan ketika jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya melaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan Selasa. Dalam apel pagi tersebut, seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya membacakan Sapta Tertib Pertanahan yang terdiri dari Tertib Administrasi; Tertib Anggaran; Tertib Perlengkapan; Tertib Perkantoran; Tertib Kepegawaian; Tertib Disiplin Kerja; dan Tertib Moral. Diharapkan dengan membacakan Sapta Tertib Pertanahan, integritas akan terinternalisasi dimasing-masing pegawai sehingga integritas dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang peserta pimpin, nilai integritas yang ditumbuh kembangkan kepada setiap pegawai/karyawan tentunya tidak terlepas dari tugas dan fungsi yang diemban. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Hal-hal yang dapat mereduksi nilai integritas pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas pengadaan tanah dan pengembangan harus ditiadakan dengan menerapkan aturan yang sudah digariskan.

Dalam kaitan dengan implementasi aksi perubahan ini, yang berfokus pada jenis inovasi teknologi, selain untuk pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka penunjang pengambilan keputusan, percepatan, dan mitigasi risiko kegiatan, juga sebagai upaya membangun integritas di tempat tugas yang

peserta pimpin. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pekerjaan maka dapat menutup celah tindakan pungli dan mencegah korupsi.

Setelah tercapai satu pemahaman terhadap teknologi informasi, selanjutnya faktor yang tidak kalah penting perlu dipikirkan adalah motor penggerak teknologi informasi itu sendiri yaitu sumber daya manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi informasi dalam rangka penerapan nilai integritas, maka aksi perubahan sulit diimplementasikan. Dalam hal ini peserta telah memetakan kemampuan masing-masing pegawai/karyawan yang dipimpin. Bagi pegawai/karyawan yang sudah mampu mengoperasikan teknologi informasi akan terus ditingkatkan kompetensinya, sedangkan bagi pegawai/karyawan yang kurang mampu mengoperasikan teknologi informasi akan dibimbing untuk menjadi lebih baik, baik itu dengan belajar mandiri, pelatihan tatap muka/daring, dan *sharing knowledge* melalui pertemuan rutin Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

Proses membangun integritas melalui pemanfaatan teknologi informasi juga membutuhkan dukungan sumber daya peralatan meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang dibutuhkan antara lain komputer/laptop, printer, scanner, harddisk/flashdisk portable, dan infrastruktur jaringan internet. Sementara itu, perangkat lunak yang diperlukan antara lain terdiri dari software pengolah data spasial (GIS), aplikasi perkantoran, aplikasi tekstual dan spasial berbasis online, dan cloud service untuk penyimpanan data online.

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, dimuat nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, ada 3 (tiga) nilai kementerian yang wajib dipegang teguh oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kementerian yaitu Melayani, Profesionalisme, Terpercaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Melayani

Dalam melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan.

2. Profesionalisme

Dalam profesional terkandung makna bahwa dalam berkerja mengutamakan kolaborasi, bersikap terbuka, selalu semangat dalam menghadapi perubahan termasuk perubahan teknologi.

3. Terpercaya

Dalam terpercaya mengandung makna bahwa dalam bekerja, berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanat jabatan dan prinsip-prinsip moral.

Dalam keputusan di atas dapat dicermati bahwa arahan penting yang disepakati para pengambil kebijakan di kementerian adalah perihal pemanfaatan teknologi, yang mana tampak jelas pada nilai Melayani dan nilai Profesionalisme. Nilai-nilai yang tercantum dalam keputusan ini sesuai dengan koridor *core values* ASN BerAKHLAK, terutama dalam hal Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pelayanan prima kepada masyarakat tidak mungkin terwujud bilamana pola kerja ASN masih serba manual. Pola kerja manual sudah usang dan banyak kelemahan seperti tidak efektif, tidak efisien, tidak akuntabel, dan tidak transparan yang rentan korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengingat banyaknya kelemahan pola kerja manual, kiranya langkah penerapan teknologi informasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah tepat untuk menjadi organisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, seluruh pegawai/karyawan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib menanamkan nilai-nilai kementerian pada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

Berbagai macam kegiatan dan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan telah memanfaatkan teknologi informasi. Progres realisasi kegiatan berbasis anggaran DIPA dapat dipantau pemutakhirannya melalui spreadsheets online internal Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Hal ini mencakup pula daftar inventarisasi masalah yang menjadi hambatan, kendala, dan masalah terkait kegiatan. Dengan pola kerja seperti ini, peserta selaku pimpinan Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dapat segera mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ditemukan.

Pelaksanaan nilai-nilai kementerian yang berkaitan dengan teknologi informasi terhadap pelayanan pertanahan telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya berbasis aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Selain itu, untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi tentang pelayanan pertanahan dan kegiatan kantor pertanahan maka telah dimanfaatkan diseminasi informasi melalui media sosial seperti instagram. Aktivitas pegawai sehari-hari pun telah memanfaatkan teknologi informasi seperti presensi online dan persuratan, yang diakses melalui tautan aplikasi atrbtn.go.id/pintasan.

Dalam kaitan pelayanan informasi nilai tanah, pemanfaatan teknologi informasi digunakan dalam kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Oleh karena itu, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan melalui gagasan peserta telah membuat inovasi Portal Data dan Informasi layanan informasi nilai tanah melalui SINTA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sebagai instrumen memudahkan pengguna untuk mendapatkan layanan informasi langsung digadget masing-masing.

C. Pengelolaan Tim

Keberhasilan peserta untuk mengimplementasikan aksi perubahan ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan Tim Efektif. Untuk itu perlu membangun Tim Efektif guna mensukseskan aksi perubahan ini. Membangun tim efektif merupakan sebuah proses, dan tentu ini adalah suatu tantangan. Tim yang efektif tidak terbangun secara tiba-tiba, namun melalui suatu tahapan. Setiap tahapan ini sangat memiliki arti yang penting bagi tim. Dalam perjalanannya, proses membangun tim ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat juga terjadi dalam waktu yang lama. Proses ini tergantung pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi pembentukan tim tersebut. Setiap tahapan tentu memiliki ciri dan karakteristik sendiri dan ini menuntut penanganan yang tentu berbeda.

Dalam aksi perubahan ini, Tim Efektif telah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Berikut ini adalah susunan Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi layanan informasi nilai tanah melalui Aplikasi SINTA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.

Tim Leader selaku koordinator Aksi Perubahan ini telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya selaku mentor dalam pembentukan tim kerja, kemudian di bentuk susunan tim pelaksana efektif aksi perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasrya Nomor: 84/SK-13.10/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 1 Secara Blended Learning Tahun 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tanggal 5 April 2024. Penerbitan SK ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dan penggunaan anggaran untuk pembiayaan seluruh tahapan kegiatan Aksi Perubahan Optimalisasi Pelayanan Nilai Tanah. Susunan tim efektif aksi perubahan beserta uraian tugas masing-masing anggota tim efektif aksi perubahan dicantumkan di dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Susunan Tim Efektif Aksi Perubahan

Peran	Nama	Jabatan	Tugas
<i>Project Leader</i>	Andi Wirya Purwasena,S.ST, M.M	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Sebagai Project Leader bertanggung jawab dalam setiap kegiatan aksi perubahan
Mentor	Yuhendri, S.SiT, M.H	Kepala Kantor Pertanahan	Sebagai Mentor memberikan arahan dan dukungan terhadap aksi perubahan
Coach	Ir. Achmad Taufiq, M.Si.,QRMO	Widyaiswara	Sebagai Coach memberikan bimbingan serta arahan terhadap aksi perubahan
Tim Efektif	Sutri Yenti, S.H.	Kepala Subbag Tata Usaha	Selaku penanggung jawab loket serta memberikan arahan pada petugas loket
	Heru Gunawan Putra, S.H., M.Kn.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Memberikan dukungan terkait dengan pelaksanaan PNBP peralihan hak
	Ika Indah Karlina, S.Si.	Korsub Pengadaan Tanah dan Penilaian Tanah	Membantu Project Leader dalam pelaksanaan

			implementasi aksi perubahan
	Jaka Marda, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	Membantu Project Leader dalam Publikasi Layanan
	Waylia Rizki Hardiwan, SH.	PPNPN	Membantu Project Leader Melayani Pemohon
	Lelen Karsih	PPNPN	Membantu Project Leader Melayani Pemohon
	Ari Hanura S.H	PPNPN	Membantu Project Leader Melayani Pemohon

Menindaklanjuti surat keputusan tentang Tim Efektif Aksi Perubahan maka seluruh anggota Tim melakukan pertemuan pada tanggal 10 April 2024. Pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap tujuan aksi perubahan dan mengarahkan Tim untuk melaksanakan tugas sesuai target yang ditentukan.

D. Strategi Pengembangan Kompetensi Stakeholders

Dalam proses kepemimpinan yang berkaitan dengan strategi pengembangan kompetensi *takeholders* telah dilakukan *project leader* secara klasikal/non klasikal. Berikut ini adalah penjabaran strategi pengembangan kompetensi *stakeholders* dalam aksi perubahan.

Tabel 2. Kompetensi stakeholder

No	Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/ Non Klasikal)
1	Masyarakat	Memahami mekanisme dan prosedur Layanan SINTA	Klasikal
2	Instansi yang memerlukan tanah	Mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi	Klasikal
3	PPAT	Mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi	Klasikal
4	Media Massa	Mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi	Klasikal/ Non Klasikal

Cara pengembangan kompetensi yang dilakukan terhadap Pihak Terdampak secara Klasikal/Non Klasikal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat, dilakukan pada saat sosialisasi penggunaan aplikasi di kantor Wali Nagari Setempat
2. Instansi yang memerlukan tanah, dilakukan saat koordinasi penentuan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum
3. PPAT, dilakukan rutin dalam pertemuan saat pembinaan PPAT
4. Media Massa, dilakukan ketika pihak wartawan berkunjung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya atau dapat berkomunikasi melalui ponsel

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Implementasi aksi perubahan telah berhasil menyediakan Portal Data dan Informasi Nilai Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya (SINTA). Aplikasi ini mampu menyajikan data dan informasi nilai tanah yang dapat diakses di smartphone pengguna. Penyajian data dan informasi ini meliputi tekstual dan spasial sehingga memudahkan pengguna layanan untuk mendaftarkan serta menerima hasil dari smartphone secara mandiri. Namun yang perlu diperhatikan yaitu ruang penyimpanan data online sehingga SINTA dapat digunakan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, penyimpanan data online dapat berlangganan cloud service dengan menyesuaikan anggaran dan kapasitas ruang penyimpanan.

Saat ini pelayanan nilai tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya masih mewajibkan pemohon untuk datang dan mendaftarkannya di loket pelayanan. Hal ini tentu membuat pengeluaran (cost) yang tidak sedikit minimal masyarakat 2 kali ke kantor untuk mendapatkan hasil pelayanan. Jarak dari batas kabupaten dengan Letak Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya cukup jauh kurang lebih 70 km. Terdapat beberapa hal yang menjadi isu strategis terkait Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan (PTP) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya antara lain:

- a. Keterbatasan Masyarakat, Instansi Terkait dan Badan Usaha dalam mengakses layanan elektronik informasi nilai tanah, asset dan property. Saat ini pelayanan Informasi nilai tanah hanya dapat dilakukan dengan mendaftar langsung ke kantor Pertanahan.
- b. Belum adanya kegiatan pengadaan tanah dan pencadangan tanah di kabupaten dharmasraya.
- c. Belum adanya kegiatan konsolidasi, pengembangan dan pemanfaatan tanah

Saat ini kementerian ATR/BPN sudah meluncurkan aplikasi geospasial berupa Portal www.bhumi.atrbpn.go.id namun portal ini hanya memberikan informasi bersifat range harga yang tidak bisa menunjukkan harga perbidang, sehingga untuk menentukan nilai tanah terhadap bidang perlu adanya pendaftaran tanah ke kantor pertanahan setempat serta mendapatkan legalisasi produk informasi tersebut. Terkait kebijakan satu data nilai tanah

juga belum mengakomodir kepentingan dari Pemerintah Daerah terkait fiskal, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengikat, Saat ini Pemerintah Daerah masih melakukan survey secara parsial untuk menentukan nilai pajak pertanahan. semoga kedepannya dengan masifnya pemanfaatan nilai tanah berbasis ZNT ini menjadikan kebijakan satu data dapat terwujud.

Implementasi dari tahapan inovasi Aksi Perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Leader dari tahapan jangka pendek selama 2 (dua) bulan sebagai berikut :

1. Capaian Tahapan Inovasi

a. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor

Pelaksanaan aksi perubahan dimulai dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor sejak tanggal 25 Maret 2024 hingga kegiatan penyusunan aksi perubahan selesai. Konsultasi dan koordinasi yang dilakukan untuk mendapatkan arahan dan masukan terkait dengan langkah langkah dalam Optimalisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah melalui Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) di Kabupaten Dharmasraya. Koordinasi dan konsultasi dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan tahapan kegiatan aksi perubahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Bapak Yuhendri S.SiT M.H . selaku mentor dalam kegiatan aksi perubahan memberikan dukungan penuh untuk Optimalisasi Pelayanan Informasi Nilai Tanah melalui Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA).



Gambar 1. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor



b. Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim Efektif

Rapat persiapan dan pembentukan tim efektif dilaksanakan pertama kali pada 27 Maret 2024 di Ruang Rapat mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Efektif dengan tujuan membentuk Tim Efektif yang memiliki persamaan tujuan dan membangun kesepakatan dalam melakukan implementasi aksi perubahan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan



Gambar 2. Rapat Koordinasi dan Pembentukan Tim

Dalam rapat persiapan dan pembentukan tim efektif dihasilkan beberapa hal Sebagai berikut :

5. Penyusunan tim Efektif dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan Aksi perubahan Optimalisasi Pelayanan melalui SINTA di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
6. Tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan perubahan aksi akan dituangkan dalam surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.
7. Jadwal Pelaksanaan yang disepakati bersama



Gambar 3. Undangan Pembentukan Tim Aksi Perubahan

c. Penerbitan Surat Keputusan Tim Aksi Perubahan

Untuk melaksanakan aksi perubahan, maka telah dibentuk tim pelaksana efektif sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Nomor: 84/SK-13.10/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 1 Secara Blended Learning Tahun 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tanggal 5 April 2024. Penerbitan SK ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dan penggunaan anggaran untuk pembiayaan seluruh tahapan.



Gambar 4. Surat Keputusan Tim Aksi Perubahan

d. Rapat Koordinasi

Koordinasi Internal Bersama dengan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Sub Bagian Tata Usaha dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024. Dalam koordinasi ini diharapkan bantuan dan dukungan teknis terkait aksi perubahan



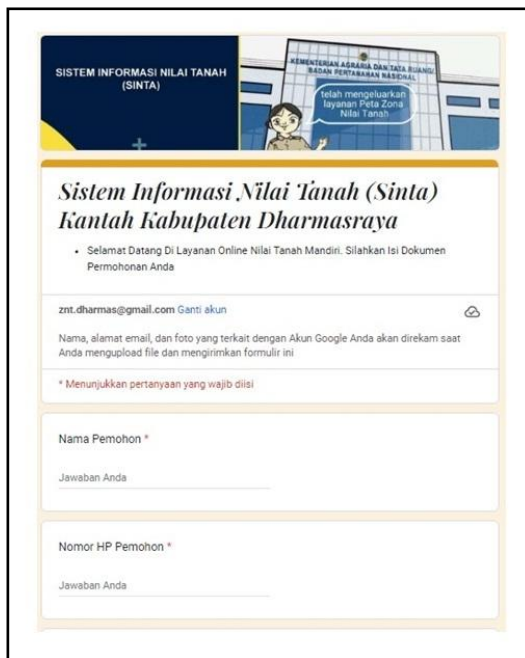
Gambar 5. Rapat Koordinasi Internal

A. Pembuatan rancangan sistem aplikasi

1. Menganalisa sistem yang digunakan bersama tim melakukan rapat bersama untuk membuat suatu platform bantuan yang mudah dioperasikan baik oleh masyarakat pengguna layanan maupun oleh admin (grafikal dan tekstual)
2. Pembuatan rancangan aplikasi SINTA pada smartphone/android
Menindaklanjuti sistem yang ada yaitu KKP maka dilakukan rancangan dengan harapan hasilnya menjadi mudah dan menarik

B. Pembuatan Aplikasi SINTA

1. Integrasi Aplikasi SINTA dengan menggunakan Aplikasi Google Form yang terintegrasi dengan email Kantor sebagai media komunikasi data pelayanan.



Gambar 6. Halaman SINTA



Dengan alamat portal http://s.id/sinta_dharmas atau dapat juga diakses melalui barcode dibawah ini :



2. Menyusun tata cara menggunakan aplikasi SINTA melalui promosi ke masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan melalui smartphone masing-masing. Adapun media promosi antara lain:

- a. media sosial resmi kantor pertanahan kabupaten Dharmasraya
- b. pemasangan link pemberitahuan layanan informasi nilai tanah di loket kantor
- c. Pencetakan Phamplet
- d. Sosialisasi

3. Pengadaan perangkat lunak dan keras

Penyiapan perangkat seperti PC dan Handphone untuk admin tekstual dan grafikal untuk memonitor permohonan dan meneruskan ke aplikasi KKP.

4. Penyiapan Fasilitasi Uji Coba Aplikasi

Dilakukan ujicoba sekaligus sosialisasi ke masyarakat melalui Kantor Nagari di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya bisa diakses langsung melalui smartphone. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa mengetahui informasi nilai tanah saat dibutuhkan. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan transaksi dan juga sebagai acuan dalam rangka penghitungan PNBP yang berlaku di Kementerian ATR/BPN

d. tahapan implementasi

1. Sosialisasi

Sosialisasi ke masyarakat melalui kantor wali nagari sekaligus bimtek dan pendampingan penggunaan aplikasi SINTA



MATERI SOSIALISASI AKSI PERUBAHAN

Optimalisasi Pelayanan melalui penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya

Kegiatan : Sosialisasi Optimalisasi Pelayanan Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) Kantor Dharmasraya

Lokasi : Nagari Se-Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya

Tahun : 2024

- Zona Nilai Tanah yang selanjutnya diingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya. Yang batasnya bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisa petugas dengan metode membandingkan harga pasar dan transaksi.
- Latar belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, Direktorat penilaian tanah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 1. Penyusunan perencanaan kebijakan di bidang penilaian tanah
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian tanah
 3. Penyusunan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang penilaian tanah
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian tanah
 5. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
- Selain itu berdasarkan PP No. 428 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN terdapat beberapa pelayanan pertanahan yang mengacu pada nilai tanah yang diperoleh dari Peta Zona Nilai Tanah. Peta ZNT dapat pula menjadi referensi pada tahapan kegiatan perencanaan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
- Salah satu target Kementerian pada tahun 2023 adalah mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing.
- Kantor pertanahan kabupaten dharmasraya sebagai bagian dari kementerian agraria dan tata ruang/BPN dalam mengemban tugas dan fungsinya selalu berusaha memberikan pelayanan pertanahan secara luas, merata dan menyeluruh kepada masyarakat pengguna layanan namun banyak kendala dan hambatan.
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka kantor pertanahan kabupaten dharmasraya mengemban Aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) untuk mengoptimalkan pelayanan.

Gambar.7 Sosialisasi di Nagari Sungai Rumbai

2. Rapat penyusunan jadwal dan petugas layanan informasi nilai tanah, pembagian tugas dalam implementasinya sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Andi Wirya Purwasena, S.ST M.M

Pelaksana Harian : Ika Indah Karlina S.Si

Admin Tekstual : Ari Hanura, Waylia

Admin Grafikal : Ika Indah Karlina, S.Si

Berikut penjelasan halaman aplikasi SINTA

1. Halaman awal aplikasi, setelah mengakses link akan tampil sebagai berikut



2. Setelah melakukan pengisian data pada halaman tersebut akan ada pilihan bagi yang sudah membayar PNBP atau belum, bagi yang sudah akan diarahkan mengupload bukti bayar namun bagi yang belum akan dibantu untuk mendapatkan kode billing untuk membayar PNBP dengan komunikasi dengan bantuan email maupun chat whatsapp. Kode biling ini didapat dari aplikasi kantor pertanahan sehingga tercatat di penerimaan PNBP Kementerian ATR/BPN

Nama Pemohon *

Jawaban Anda _____

Nomor HP Pemohon *

Jawaban Anda _____

Silahkan Upload Dokumen Anda Berupa :*

1. KTP
2. Sertipikat
3. Foto Lokasi Tanah

[Tambahkan file](#)

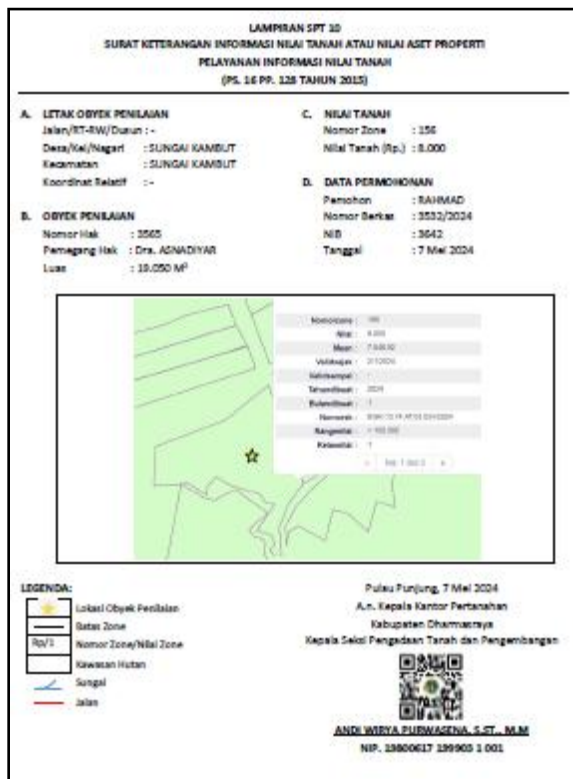
Apakah Anda Sudah Bayar PNBPN ZNT *

Sudah

Belum

[Berikutnya](#) Halaman 1 dari 3 [Kosongkan formulir](#)

3. Setelah data telah diinput akan tersimpan di email dan selanjutnya admin akan memproses Peta Informasi Nilai Tanah dan akan dikirimkan langsung melalui email maupun whatsapp pemohon. Dokumen ini sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik sehingga cukup dengan aplikasi untuk legalitas.



Gambar 8. hasil Aplikasi SINTA

4. Uji coba aplikasi kepada masyarakat

Aplikasi ini diujicobakan di loket kantor pertanahan kabupaten dharmasraya untuk mengedukasi masyarakat akan kemudahan aplikasi SINTA



Gambar 9 Penggunaan aplikasi

e. Tahap Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring penyelesaian aksi perubahan

Pada tahap ini dilakukan monitoring dari awal sampai selesainya implementasi sehingga begitu terjadi kendala yang tidak sesuai dengan jadwal atau kegiatan yang akan menyimpang dari tujuan aksi perubahan ini maka kami dapat langsung melakukan perbaikan dan atau pencegahan sehingga arah dan tujuan dari kegiatan aksi perubahan ini bisa berjalan dengan lancar.

2. Evaluasi

Setiap minggunya kami melakukan evaluasi secara priodik dan diakhir kegiatan dilakukan evaluasi menyeluruh.

C. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Pertanahan, dimana Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat beberapa pelayanan pertanahan yang mengacu pada nilai tanah yang diperoleh dari Peta Zona Nilai Tanah. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tersebut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan Nilai Tanah adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah

B. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat aksi perubahan berjudul Optimalisasi pelayanan informasi melalui aplikasi SINTA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya meliputi manfaat bagi internal, manfaat bagi Instansi yang Memerlukan Tanah, manfaat bagi Pihak yang Berhak, dan manfaat bagi kementerian, sebagai berikut:

a. Bagi Internal

1. mempermudah pelayanan informasi pertanahan oleh petugas kepada masyarakat
2. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN

b. Bagi eksternal

1. Masyarakat dapat mengetahui informasi nilai tanah dengan cepat
2. Pemda dapat mengetahui nilai tanah sebagai referensi dalam rangka validasi BPHTB
3. Instansi yang memerlukan tanah dapat mengetahui lebih awal harga/nilai tanah dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah
4. Bagi investor dapat mengetahui nilai tanah dalam rangka rencana penanaman modal

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan bersama oleh peserta dengan mentor. Peserta melakukan self assessment dan dengan instrumen yang sama mentor melakukan assessment kepada peserta. Kedua hasil assessment ini menjadi bagian proses mentoring untuk mendapatkan kesepakatan kebutuhan pengembangan potensi (gap hasil pemetaan) dan juga strategi meningkatkan potensi peserta untuk menutup gap hasil pemetaan. Strategi dapat diprioritaskan pada aspek tertentu atau keseluruhan aspek yang diputuskan dalam proses mentoring. Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh peserta, mentor, tidak terdapat gap hasil pemetaan. Pemetaan sikap perilaku terdiri dari 3 (tiga) komponen dan 16 (enam belas) sub komponen, masing-masing yaitu:

a. Komponen Integritas

- 1) Mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.
- 2) Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya.
- 3) Mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan tenggat waktu yang ada dan mematuhi ketentuan terkait waktu kerja yang berlaku dalam organisasi.
- 4) Memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai dengan etika organisasi.
- 5) Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya.
- 6) Memberikan argumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di organisasi dan konsekuensinya dalam mengingatkan atau mengajak rekan kerja/ bawahan dalam penegakan aturan.

b. Komponen Kerjasama

- 1) Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya.

- 2) Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kinerja di lingkup unitnya.
- 3) Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi.
- 4) Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.
- 5) Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.

c. Komponen Mengelola Perubahan

- 1) Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- 2) Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.
- 3) Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang berlaku.
- 4) Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan.
- 5) Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik.

2. Hasil Penilaian Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan oleh Peserta dan Mentor

Berikut ini akan disampaikan hasil penilaian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan oleh Peserta dan Mentor.

a. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor



REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : Andi Wiryu Purwasena, S.ST MM. **Nama Mentor** : Yuhendri Yakub, S.SIT MH
NIP : 19800617 199903 1 001 **NIP:** : 19780831 199803 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya **Instansi** : Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	8	9	8,70	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8,70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata	8,33	9,00	8,80	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8	8,00	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8,00	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Flexibilitas	8	8	8,00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	8,00	8,00	8,00	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	7	7,30	Baik
	Adaptabilitas	8	8	8,00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	8	8,00	Baik
	Rata-Rata	8,00	7,80	7,86	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,11	8,27	8,22	Baik

Keterangan Kualifikasi

9-10 Istimewa
 7-8,99 Baik
 5-6,99 Cukup
 3-4,99 Kurang
 1-2,99 Sangat Kurang

b. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : Andi Wiryu Purwasena, S.ST MM. **Nama Mentor** : Yuhendri Yakub, S.SIT MH
NIP : 19800617 199903 1 001 **NIP:** : 19780831 199803 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengemba Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya **Instansi** : Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
Program : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8,33	8,00	8,00	8,11	Baik
Mentor	9,00	8,00	7,80	8,27	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,80	8,00	7,86	8,22	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9-10 Istimewa
 7-8,99 Baik
 5-6,99 Cukup
 3-4,99 Kurang
 1-2,99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,22
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawalan instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

3. Implementasi Strategi Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Peserta dan Mentor, diperoleh nilai akhir sikap perilaku 8,22 dengan kualifikasi Baik, yang berarti tidak terjadi gap, hal ini menunjukkan bahwa peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat pelaksanaan aksi perubahan dengan bimbingan dan pendampingan dari Mentor. Sebagai evaluasi dari mentor, maka peserta harus menyampaikan evidence dan melaporkan progres setiap aksi perubahan secara berkala.

D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan memuat uraian singkat substansi mata pelatihan pilihan apa saja yang diambil, proses *delivery*nya, dan menjelaskan proses adopsi/adaptasi/hubungan dari mata pelatihan pilihan tersebut dalam implementasi aksi perubahan. Dalam kaitan dengan aksi perubahan ini, ada 3 (tiga) mata pelatihan pilihan yang diuraikan.

Melalui pembelajaran mata pelatihan pilihan ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, melaksanakan, dan memanfaatkan substansi yang relevan dengan aksi perubahan baik di dalam Learning Management System (LMS) maupun luar LMS dalam upaya mengembangkan ide kreatif maupun pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi secara berkualitas.

Tabel 3. Mata Pelatihan Pilihan

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan Pilihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan aksi perubahan	Sumber Pembelajaran
1	Optimalisasi Pelayanan melalui penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) Pada Kantor	Webinar Penerapan Sertipikat Elektronik di Kemeterian ATR/BPN	LMS PPSDM Kementerian ATR/BPN	SINTA dirancang untuk mengadopsi pelayanan elektronik	Seminar
2	Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Bintek Bidang Pengadaan tanah dan Pengembangan	Kanwil BPN Sumbar	SINTA dirancang untuk dapat	Sosialisasi

		Kanwil BPN Sumatera Barat		meningkatkan PNBP Layanan Informasi Nilai Tanah	
3		Sistem layanan pertanahan kota palembang	LMS PPSDM Kementerian ATR/BPN	SINTA mengadopsi aplikasi informasi SILAPER dengan beberapa perubahan terkait layanan informasi nilai tanah	Modul

Dari uraian yang disajikan dalam tabel di atas, terdapat 3 (tiga) mata pelatihan pilihan yang berhubungan dengan aksi perubahan ini. Adapun jalur pembelajaran yang dilakukan yaitu melalui LMS PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Berikut ini uraian singkat mata pelatihan pilihan tersebut

1. Webinar penerapan sertipikat elektronik

Menurut penulis materi muatan dari webinar ini, kegiatan layanan informasi nilai tanah merupakan produk dari kementerian sebagai sumber PNPB. Layanan ini termasuk yang dapat dilaksanakan dengan mode online yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan hasil melalui smartphone dan dapat bersifat paperless.

2. Bintek Bidang pengadaan dan pengembangan

Bimbingan teknis terkait dengan bidang pengadaan tanah dan pengembangan dimana layanan informasi nilai tanah merupakan bagian dari tugas seksi pengadaan tanah yang merupakan sumber PNPB layanan informasi. Dari evaluasi dikemeterian PNPB informasi

nilai tanah masih sangat rendah sehingga arahan dari Dirjen agar Kantor Pertanahan memaksimalkan layanan nilai tanah.

3. Sistem layanan pertanahan Kota Palembang (SILAPER)

Menurut penulis materi dari layanan SILAPER yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang menginspirasi terkait layanan yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi atau produk pertanahan tanpa harus mendatangi kantor pertanahan. Hal ini tentu dapat meningkatkan animo masyarakat untuk mendapatkan layanan secara mudah dan murah.

E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

1. *Feedback Individual Development Plan*

Setelah dilaksanakan kegiatan *Feedback Individual Development Plan* secara daring. Hasil penilaian Assesor kepada peserta dalam kegiatan ini bahwa terdapat 4 (empat) area pengembangan yang perlu menjadi perhatian peserta, yaitu:

- a. Orientasi pada hasil, dengan area pengembangan menetapkan standar kerja yang lebih menantang sehingga hasil kerja lebih menantang
- b. Pelayanan publik, dengan area pengembangan “ lebih produktif menggali permasalahan dan harapan pemangku kepentingan guna memenuhi kebutuhan masyarakat”
- c. Mengelola perubahan, dengan area pengembangan “ meningkatkan keterlibatan, kesigapan dan kemandirian dalam menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang baru dan senantiasa berubah”
- d. Pengambilan keputusan, dengan area pengembangan “ meningkatkan kecermatan dalam menganalisa masalah dan merancang alternatif solusi sesuai aturan berlaku “

Dalam hal orientasi pada hasil, kegiatan pengembangan yang dianjurkan adalah penugasan pada suatu kegiatan dengan target waktu dan hasil yang dicapai, pada pelayanan publik kegiatan yang dianjurkan adalah lebih banyak melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada pihak yang berkepentingan. Dalam mengelola perubahan kegiatan pengembangan yang dianjurkan diskusi bersama atasan dan rekan kerja. Untuk pengambilan keputusan kegiatan pengembangan yang dianjurkan meminta arahan dan petunjuk atasan.

2. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan pengembangan potensi diri yang telah dilakukan peserta dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan.

a. Orientasi pada hasil

Kegiatan informasi nilai tanah merupakan salah satu layanan pada kantor pertanahan. proses ini sangat sederhana karena mengutip hasil dari peta Zona Nilai Tanah (ZNT) sehingga dengan adanya aplikasi SINTA, hasil dari layanan dapat segera didapatkan oleh masyarakat dengan waktu singkat.

b. Pelayanan publik

Sebagai kantor pelayanan publik , Kantor Pertanahan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dalam hal kepuasan layanan, transparansi biaya dan kepastian waktu menerima hasil layanan. Penulis berupaya memperbanyak literasi terkait dengan pelayanan publik.

c. Mengelola perubahan

Mampu mengelola perubahan sesuai tuntutan zaman, dimana teknologi informasi sudah menjadi keharusan. Efisiensi waktu serta pelayanan yang optimal tentu menjadi tujuan dari kementerian. itu peserta mengembangkan potensi diri terkait mengelola perubahan dengan belajar mandiri melalui buku.

d. Pengambilan keputusan

Dalam hal mengambil keputusan peserta mengajukan konsep petunjuk kepada atasan mengenai penyelesaiannya.

BAB IV

DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Dalam kaitan dengan strategi komunikasi untuk diseminasi dan publikasi terhadap implementasi aksi perubahan ini maka penerapannya dilakukan secara langsung pada saat sosialisasi, rapat koordinasi, rapat monitoring dan evaluasi, serta secara tidak langsung melalui *manual book* yang telah disusun oleh Tim. Dalam kaitan dengan strategi komunikasi Strategi komunikasi diseminasi dan publikasi yang dilakukan secara langsung pada saat sosialisasi, rapat koordinasi, rapat monitoring dan evaluasi, serta secara tidak langsung melalui manual book disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan SINTA seperti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dan Masyarakat pengguna layanan.

Dengan penerapan strategi komunikasi sebagaimana uraian di atas maka diharapkan pihak-pihak terkait dapat menggunakan dan memanfaatkan Aplikasi SINTA secara baik sehingga dapat merasakan manfaat informasi tanah lebih mudah.

B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi

Implementasi aksi perubahan yang menghasilkan Aplikasi SINTA ini telah ditanggapi oleh masyarakat penggunan layanan melalui testimoni. Dari waktu dan biaya yang dikeluarkan terdapat penghematan sehingga layanan menjadi sangat mudah dan efektif.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Dukungan Mentor

Aksi perubahan ini tidak dapat diimplementasikan manakala Mentor tidak mendukungnya. Mentor yang juga sebagai pemanfaat hasil aksi perubahan sangat berperan penting mengarahkan dan membimbing peserta sehingga hasil yang akan dicapai sesuai dengan harapan. Setelah peserta memaparkan konsep gagasan aksi perubahan, Mentor sangat memberikan dukungan kepada peserta dan memotivasi peserta untuk berinovasi lebih baik lagi. Dukungan Mentor juga dapat dilihat dari surat keputusan, persetujuan, dan tandatangan pada seluruh laporan mingguan yang diajukan peserta

2. Dukungan Stakeholders

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pada intinya *stakeholders* mendukung aksi perubahan ini. Hal ini dapat dilihat dari foto-foto dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi, rapat koordinasi, rapat monitoring dan evaluasi, dan rapat berbasis data tekstual dan data spasial ini ditampilkan pada saat kegiatan tersebut sehingga menjadi fokus dan terarah serta memudahkan pembahasan

3. Penuangan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Mengenai penuangan aksi perubahan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tentu sangat dimungkinkan dimasukkan sebagai Kinerja Tambahan. Hal ini mengingat bahwa aksi perubahan ini telah menghasilkan *output* dan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan dalam rangka Optimalisasi pelayanan informasi nilai tanah melalui aplikasi SINTA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.

4. Rencana Tindak Lanjut

Agar aksi perubahan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi Nilai tanah dapat mengikat semua orang yang terlibat, perlu dibuatkan legalitas pemberlakuannya yaitu Nota Dinas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini penting agar semua yang terlibat dengan sistem dapat menaati dan menjalankan kegiatan tersebut.

Implementasi aksi perubahan ini telah memenuhi target tujuan jangka pendek yaitu Tersedianya aplikasi SINTA pada Kecamatan Sungai Rumbai sebagaimana dalam tujuan jangka pendek dapat dilaksanakan. Bahkan di kecamatan Pulau Punjung sudah dapat diakses yang seharusnya bukan tujuan jangka pendek. Kegiatan jangka pendek selama 60 hari telah dicapai dengan diberlakukannya layanan elektronik untuk informasi nilai tanah semenjak diberlakukannya aksi perubahan ini. Meskipun demikian, masih terdapat target jangka menengah dan target jangka panjang yang harus dituntaskan sebagai bagian dari rangkaian aksi perubahan ini, sebagai berikut:

a. Target Jangka Menengah

Direncanakan dalam jangka menengah ini yaitu sampai dengan akhir tahun 2024 telah tersosialisasinya Aplikasi di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

b. Target Jangka Panjang

Direncanakan aplikasi ini akan disosialisasi di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Dharmasraya sehingga pelayanan informasi nilai tanah hanya dilayani melalui aplikasi SINTA. Dengan terbukanya akses nilai tanah bagi masyarakat umum menjadikan kontrol dalam menetapkan harga nilai tanah.

Dalam upaya merealisasikan penyelesaian target jangka menengah maka kegiatan aksi perubahan akan dilanjutkan mulai bulan Juli 2024 s/d paling lama Juni 2025. Selanjutnya target jangka panjang dimulai bulan Maret 2025 s/d masa berlaku jangka waktu berakhir pada tahun 2027.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi Aksi Perubahan dengan judul : “Optimalisasi Pelayanan Nilai Tanah Melalui Sistem Informasi Nilai Tanah (SINTA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya” yang telah dilaksanakan oleh Tim Leader, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi nilai tanah selama ini dilaksanakan dengan mekanisme loket kurang optimal karena membutuhkan lebih banyak waktu serta biaya baik transportasi maupun kertas. Adapun capaian yang diperoleh setelah aksi perubahan dilaksanakan antara lain :

1. Tersedianya satu link untuk pelayanan informasi nilai tanah
2. Peningkatan kompetensi sdm dalam hal mengelola layanan informasi nilai tanah
3. Data- data pelayanan informasi nilai tanah tersusun secara digital
4. Waktu layanan lebih singkat dan lebih mudah
5. Meningkatnya PNBPN informasi nilai tanah

B. Rekomendasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Optimalisasi pelayanan informasi nilai tanah melalui SINTA, penulis sebagai Tim Leader dalam Aksi Perubahan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen dari seluruh petugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi nilai tanah melalui Aplikasi SINTA
2. Perlu mengajukan pendanaan dalam DIPA tahun 2025 untuk menambah perangkat pengolahan data spasial dan langganan penyimpanan database online.
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk memberikan pemahaman sehingga hasil dari kegiatan ini dapat dimanfaatkan.



4. Memberikan masukan kepada Pusdatin Kementerian ATR/BPN agar ada peningkatan aplikasi pelayanan informasi Nilai Tanah elektronik yang bisa diakses langsung oleh masyarakat (Akun perorangan) baik yang sudah ada sertifikat atau yang belum bersertifikat bahkan bagi calon pembeli/investor /instansi yang memerlukan tanah dalam rangka pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara. 2019 *Modul Manajemen Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2019. *Manajemen Pengawasan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2020. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 5 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Struktural Kepemimpinan*. Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 324. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara. 2021 *Modul Bela Negara Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Etika Dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Membangun Tim Efektif di Era New Normal Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul *Pelayanan Publik Digital Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul *Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.

Lembaga Administrasi Negara. 2021. Modul *Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*.